

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya

Hanugrah Zain Perbawaningati<sup>1</sup>, Sigi Jenar Mahesa Ayu<sup>2</sup>, Fihaqi Izza Aldin Ramadhani<sup>3</sup>,  
Mohammad Ali<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur, Surabaya

E-mail: <sup>1</sup>[23041010026@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010026@student.upnjatim.ac.id), <sup>2</sup>[23041010039@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010039@student.upnjatim.ac.id),  
<sup>3</sup>[23041010246@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010246@student.upnjatim.ac.id)

### ABSTRAK

Meningkatnya volume sampah di Kota Surabaya tidak lepas dari pertumbuhan jumlah penduduk dan tingginya aktivitas perekonomian, sehingga diperlukan solusi penanganan yang efektif salah satunya melalui program berbasis masyarakat seperti Bank Sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana program Bank Sampah di Kelurahan Tegalsari dijalankan dan faktor apa saja yang berkontribusi terhadap keberhasilannya, dengan berlandaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang bersumber dari dokumentasi resmi terkait. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa program Bank Sampah telah terlaksana dengan baik dan selaras dengan faktor-faktor dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, khususnya pada aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya akibat tidak meratanya distribusi bantuan fasilitasi dari pemerintah. Secara keseluruhan, keberhasilan program ini bertumpu pada komitmen para pengelola, keikutsertaan masyarakat, dan kerja sama dengan pihak swasta, namun di sisi lain juga menuntut perbaikan dalam hal koordinasi dan keterbukaan informasi terkait dukungan pemerintah agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih baik dan terus berkelanjutan.

**Kata kunci :** *implementasi kebijakan, bank sampah, partisipasi masyarakat*

### ABSTRACT

The increasing volume of waste in Surabaya City is inseparable from population growth and high economic activity, so that effective management solutions are needed, one of which is through community-based programs such as the Waste Bank. The purpose of this study is to analyze how the Waste Bank program in Tegalsari Village is implemented and what factors contribute to its success, based on the policy implementation theory of George C. Edwards III. This study uses a qualitative method with a case study approach, collecting primary data through in-depth interviews and secondary data sourced from related official documentation. The research findings show that the Waste Bank program has been implemented well and is in line with the factors in the policy implementation theory of George C. Edwards III, particularly in the aspects of communication, disposition, and bureaucratic structure, although there are still obstacles in the aspect of resources due to the uneven distribution of facilitation assistance from the government. Overall, the success of this program rests on the commitment of the managers, community participation, and cooperation with the private sector, but on the other hand it also requires improvements in terms of coordination and information transparency regarding government support so that waste management can run better and continue sustainably.

**Keyword :** *policy implementation, waste banks, community participation*

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah saat ini menjadi salah satu isu lingkungan yang sangat serius dan mendesak untuk ditangani, baik di tingkat lokal maupun global. Meskipun berbagai kemajuan teknologi dan pembangunan di berbagai bidang terus berkembang, pengelolaan sampah yang efektif masih menjadi tantangan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, proses urbanisasi yang semakin cepat, serta pola konsumsi masyarakat yang terus bertambah sehingga volume sampah yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan. Dampaknya, banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami kelebihan kapasitas, jumlah limbah plastik semakin meningkat, dan kondisi tersebut turut memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan serta kualitas hidup manusia. Selain berdampak pada lingkungan, persoalan sampah juga memiliki pengaruh terhadap berbagai sektor lain seperti kesehatan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kehidupan sosial (Sulistina, 2023). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 25.842.813 ton per tahun. Provinsi Jawa Timur menyumbang sekitar 4.352.437 ton, dengan Kota Surabaya sebagai penyumbang terbesar di provinsi tersebut, yaitu sekitar 660.946 ton per tahun (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025). Sebagai kota metropolitan kedua di Indonesia, Surabaya menghasilkan sekitar 1.800 ton sampah per hari, yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta pola konsumsi masyarakat.

Persoalan sampah menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan, seperti terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan. Tidak hanya

itu, pembuangan sampah secara terbuka juga berpotensi memicu munculnya berbagai penyakit bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan agar berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah dapat dicegah serta diminimalkan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya. Hal tersebut didukung sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, Pasal 2 ayat 3 bahwa "Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah". Melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya juga tertulis terkait pengelolaan sampah pada No. 5 Tahun 2014 yang diubah dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Pasal 4 yaitu "Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya".

Bank Sampah merupakan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), yang juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah serta mendukung penerapan ekonomi sirkular, dan dibentuk serta dikelola oleh masyarakat, badan usaha, maupun pemerintah daerah. Adanya kebijakan terpadu mengenai bank sampah dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, serta membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Implementasi kebijakan tersebut juga dapat dilihat melalui keberadaan 673 unit bank sampah yang tersebar di berbagai wilayah kota Surabaya (Surabaya, 2025). Keberadaan unit bank sampah

dalam jumlah yang cukup banyak mencerminkan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani permasalahan penumpukan sampah melalui pengelolaan berbasis masyarakat. Adanya usaha pengelolaan sampah ini diharapkan bahwa sampah yang ada dapat dikelola dengan baik dengan cara mendaur ulang, pemanfaatan kembali, dan menciptakan nilai ekonomi dari sampah tersebut. Namun, dalam realitanya dari 673 unit bank sampah tersebut ada beberapa yang tidak beroperasi secara optimal atau bahkan berhenti beroperasi dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat, kurangnya sosialisasi akan pentingnya pengelolaan sampah, dan terkadang masyarakat menilai bahwa keuntungan yang didapat tidak begitu besar dibanding dengan menyeter kepada pengepul sampah (Kusuma et al., 2025).

Salah satu wilayah yang menerapkan pengelolaan sampah di Kota Surabaya adalah Kecamatan Jambangan. Kecamatan Jambangan sendiri memiliki 63 bank sampah yang tersebar secara merata di 4 kelurahan. Namun, bank sampah yang masih aktif hanya 40 dari 63 bank sampah (Kusuma et al., 2025). Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Simojawar, Kecamatan Sukomanunggal, yang memiliki tiga titik bank sampah, namun hanya satu yang masih beroperasi (Dwicahyani et al., 2022). Beberapa bank sampah yang tidak aktif ini terjadi sejak pandemi COVID-19 dan sampai sekarang belum beroperasi kembali. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dan anggota aktif di Kecamatan Jambangan menyebabkan bank sampah berhenti beroperasi yang dapat menurunkan efektivitas program bank sampah dan memberikan pengaruh sehingga menyebabkan bank sampah berhenti beroperasi. Adanya ketergantungan terhadap anggota aktif menunjukkan bahwa sistem kelembagaan dan mekanisme pengelolaan belum sepenuhnya sesuai. Kondisi ini menggambarkan adanya jarak antara

target kebijakan pemerintah yang mengharapkan implementasi bank sampah berjalan secara berkelanjutan dengan realita yang terjadi di lapangan.

Sebagai upaya untuk memahami implementasi pengelolaan program bank sampah di lapangan, penelitian ini memfokuskan kajian pada salah satu wilayah di Kota Surabaya, yaitu Kelurahan Tegalsari, yang diketahui mampu menampung sekitar 6 ton sampah setiap bulannya (Trifena, 2025). Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program bank sampah di Kelurahan Tegalsari dijalankan oleh para aktor yang terlibat, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Analisis penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dengan jelas dan konsisten, sementara sumber daya mencakup ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana termasuk dalam komitmen birokrat juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi dalam mengatur mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan memengaruhi bagaimana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif (Laary, 2022).

Penelitian ini menggunakan empat variabel implementasi kebijakan menurut Edwards, guna memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program Bank Sampah sekaligus mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberlanjutan program tersebut di tingkat kelurahan. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan, khususnya dalam menjelaskan mengapa hambatan tersebut muncul dan bagaimana proses hambatan tersebut terjadi dalam pelaksanaan program Bank Sampah di Kelurahan Tegalsari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai realitas implementasi kebijakan di tingkat lokal.

## 2. LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan Publik

Secara luas implementasi memiliki makna pelaksanaan undang-undang yang di mana berbagai pihak, lembaga, langkah, dan metode bekerja bersama-sama untuk melaksanakan kebijakan demi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau program-program (Kasmad, 2018). Adapun terdapat berbagai macam persepsi mengenai pengertian implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kaendung et al., (2021), pejabat, maupun kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Menurut Merilee S. Grindle dalam Kendi, (2024) implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan publik yang tidak sekadar menjalankan keputusan yang telah ditetapkan, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses penerapan keputusan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan oleh berbagai aktor guna mencapai tujuan yang diharapkan, di mana keberhasilannya dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya.

Penelitian ini berfokus pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Tiwa et al., (2023) yang mencakup empat faktor utama, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini menawarkan kerangka analisis yang sistematis dan operasional dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Program bank sampah sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sampah melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut relevan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, mengingat keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya di lapangan.

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji tentang implementasi pengelolaan sampah melalui program bank sampah di kelurahan tegalsari kota surabaya. Menurut Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif adalah suatu proses yang menghasilkan pemahaman deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan/atau perilaku yang dapat diamati menyeluruh (Abdussamad, 2021). Adapun pendekatan studi kasus merupakan metodologi dalam pendekatan kualitatif yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap suatu sistem terbatas (satu kasus) atau beberapa sistem terbatas (multipel kasus). Dalam metode ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi relevan sehingga menghasilkan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti (Sinaga, 2023).

Peneliti memilih Kelurahan Tegalsari sebagai *locus* penelitian karena didasarkan pada keberadaan bank sampah yang menunjukkan aktivitas pengelolaan sampah yang relatif konsisten dan produktif. Bank sampah tersebut tercatat

berdasarkan laman [detikjatim.id](http://detikjatim.id) yang dirilis pada 25 Desember 2025 bahwa bank sampah di Kelurahan Tegalsari ini dapat menerima 6 ton sampah setiap bulannya (Trifena, 2025). Hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat serta keberlanjutan program yang cukup baik, sehingga menjadikan Kelurahan Tegalsari relevan untuk mengkaji implementasi program bank sampah beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Peneliti mengklasifikasikan data ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program, yakni warga Kelurahan Tegalsari, pengelola bank sampah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah di Kelurahan Tegalsari. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi resmi serta berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Sampah Sumber 10 adalah salah satu bank sampah yang beroperasi di Kota Surabaya, lebih tepatnya di Jalan Kedondong Kidul 1 Nomor 64, RT 010/RW 06, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur 60262. Lembaga ini lahir dari keterlibatan warga RT 10 RW 06 dalam program Merdeka dari Sampah (MDS) dan Surabaya Green and Clean (SGC) pada tahun 2017 dan secara resmi mendapat pengakuan sebagai bank sampah sektor melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor 188.4/1024/436.7.12/2020. Bank sampah ini beroperasi setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional, mulai

pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Bank Sampah Sumber 10 ini menerima berbagai jenis sampah anorganik seperti kertas, plastik, logam seperti aluminium dan besi, botol kaca, serta minyak jelantah yang kemudian dijual langsung kepada pengepul maupun perusahaan yang melakukan daur ulang di Surabaya.

Bank Sampah Sumber 10 yang berlokasi di Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya, dipilih sebagai objek dalam penelitian ini. Pemilihan tersebut didasarkan pada informasi dari [detikjatim.id](http://detikjatim.id) yang menyebutkan bahwa Bank Sampah Sumber 10 menerima sekitar 6 ton sampah setiap bulan, yang diperkuat oleh data laporan penerimaan sampah pada April 2026.

LAPORAN PENYERAPAN SAMPAH  
BSS SAMBER 10  
PERIODE : APRIL 2026

SAMPAH BSS	PLASTIK												
	Polyester (PET)	Polypropylene (PP)	Polyethylene (PE)	Polyethylene terephthalate (PET)	High-density polyethylene (HDPE)	Low-density polyethylene (LDPE)	Polystyrene (PS)	Polyurethane (PU)	Tekstil	Sabun	Paes	Other plastic	Total
SAMBER 10	0	0	0	1220,00	8	225	553,00	25,1	0	0	0	0	1823,10

  

SAMPAH BSS	KERTAS									
	Kertas Putih (PK)	Kardus/Koran	Koran	Kemasan	Buku/Paper	Daftar/Paper	Kertas Daki	Kertas Bekas	Sel Selaman	TOTAL
SAMBER 10	126,50	45,5	45,5	14,5	12,5	11,50	142,50	18,1	0	363,10

Gambar 1. 1 Laporan Penyerapan Sampah Pada Bank Sampah Sumber 10 Kelurahan Tegalsari

Berdasarkan data tersebut, pada bulan April 2026 Bank Sampah Sumber 10 menerima sekitar 7,4 ton sampah, yang terdiri atas 3.511,25 kg sampah plastik dan 3.911,23 kg sampah kertas. Tingginya volume penerimaan sampah ini disebabkan oleh peran Bank Sampah Sumber 10 sebagai bank sampah sektor yang menaungi 18 kecamatan dengan total 138 unit bank sampah, sehingga rata-rata volume sampah yang diterima mencapai sekitar 6–7 ton setiap bulan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III. Menurut Edwards III dalam (Tiwa et al., 2023) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat

yang dipengaruhi (Tiwa et al., 2023). Adapun menurut George C. Edwards III dalam (Tiwa et al., 2023), terdapat empat penyebab yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Komunikasi**

Dilansir dari penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Gretty Syatriani Saleh, Hasman Umuri, Defrianto Uno, (2025). Implementasi Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwanto (Studi Kasus: Bank Sampah Kecamatan Buntulia). *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Volume 17, Nomor 3 bahwa faktor komunikasi pada penelitian tersebut berkaitan dengan faktor komunikasi pada penelitian yang dilakukan di Bank Sampah Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya (Saleh et al., 2025). Kedua penelitian ini mengatakan pada bagian faktor komunikasi sudah memenuhi dan menerapkan faktor komunikasi dengan cukup baik.

Faktor komunikasi menurut George C. Edwards III adalah komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edwards III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan (Tiwa et al., 2023). Pada implementasinya, faktor ini membahas mengenai untuk mengetahui bagaimana proses penyampaian informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah kepada masyarakat di Kelurahan Tegalsari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pengurus Bank Sampah Sumber 10 Kelurahan Tegalsari,

dan masyarakat yang berperan sebagai nasabah program bank sampah menerangkan bahwa informasi ataupun penjelasan mengenai program bank sampah ini sudah diterima dengan baik, jelas, dan mudah dipahami oleh setiap pihak. Pemberian informasi yang baik, jelas, dan mudah dipahami ini juga sangat mendukung agar tujuan dan sasaran dari program bank sampah ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang menerima informasi dari regulasi yang berkaitan dengan pembentukan program bank sampah yang kemudian dibantu oleh komunitas lingkungan dan LSM untuk memberikan sosialisasi maupun pembinaan kepada pengurus bank sampah mengenai pengelolaan sampah. Pihak pengurus bank sampah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program bank sampah yang akhirnya masyarakat paham mengenai program bank sampah dan pengelolaan sampah sehingga masyarakat mau untuk menjadi nasabah dalam bank sampah tersebut.

Hasil penjelasan penelitian ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan di atas, bahwa penerapan faktor komunikasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Bank Sampah Sumber 10 Kelurahan Tegalsari juga sudah berjalan dengan baik dan memenuhi pengertian dari faktor komunikasi menurut George C. Edwards III. Hal ini tercermin dari wawancara dengan masing-masing pihak yang mengatakan bahwasanya informasi yang diterima sudah cukup jelas dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai program bank sampah. Selain itu, penerimaan informasi yang baik ini juga memberikan pengaruh terhadap tujuan dan sasaran dari adanya program bank sampah ini, yakni dengan faktor komunikasi yang terpenuhi dengan baik dan jelas maka tujuan dan sasaran dari adanya program bank sampah ini dapat tercapai dengan maksimal.

### Sumber daya

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, faktor sumber daya merupakan salah satu elemen krusial yang menentukan keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan. Edwards III menegaskan bahwa secermat apa pun pesan kebijakan dikomunikasikan, apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tersebut dipastikan berjalan lambat dan tidak akan mencapai hasil optimal. Komponen sumber daya ini tidak hanya terbatas pada kecukupan jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana, melainkan juga mencakup ketersediaan sumber daya finansial serta fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional.

Dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Sumber 10 di Kelurahan Tegalsari, aspek sumber daya manusia secara umum telah bergerak mendukung keberlangsungan program. Operasional rutin Bank Sampah Sumber 10 digerakkan secara aktif oleh tujuh orang pengurus inti yang didukung penuh oleh tingginya partisipasi serta kesadaran warga sekitar yang bertindak sebagai nasabah aktif.

Selain kapasitas manusia, pemenuhan sumber daya logistik dan fasilitas fisik di lapangan juga menjadi elemen vital dalam menjamin kelancaran sirkulasi pengumpulan dan pemilahan sampah. Aktivitas operasional di Kelurahan Tegalsari ditunjang oleh kepemilikan sarana kerja berupa timbangan, buku tabungan nasabah, karung wadah pemilah, hingga kendaraan bermotor roda tiga (Viar) sebagai armada pengangkut sampah terpilah. Ketersediaan infrastruktur ini memudahkan pengurus untuk menerima dan menyerap volume sampah dalam jumlah besar. Berdasarkan laporan penyerapan sampah Bank Sampah

Sumber 10 pada bulan April 2026, unit ini mampu menyerap total 7,4 ton sampah anorganik, yang terdiri atas 3.511,25 kg sampah plastik dan 3.911,23 kg sampah kertas.

Akan tetapi, temuan mendalam di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) informasi dan koordinasi antara pihak regulator dan pelaksana di tingkat tapak. Melalui hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah mengklaim telah mendistribusikan sumber daya penunjang secara proporsional. Dukungan tersebut disalurkan melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya limbah anorganik, serta pemberian bantuan fasilitas operasional konkrit seperti buku tabungan nasabah dan timbangan guna menstimulus jalannya program di tingkat unit.

Sebaliknya, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas operasional yang dimanfaatkan oleh Bank Sampah Sumber 10 selama ini tidak bersumber dari stimulus anggaran belanja pemerintah atau dinas terkait. Pengadaan mayoritas sarana kerja utama justru didapatkan secara swadaya mandiri oleh pengurus melalui skema kemitraan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan pihak swasta dan yayasan lingkungan. Kondisi ketidaksesuaian informasi (*miss-communication*) ini mengindikasikan alur distribusi bantuan birokrasi pemerintah belum sepenuhnya berjalan transparan dan tepat sasaran kepada pengelola lokal.

Kendati dukungan sarana dari sektor publik belum menyentuh pengelola secara langsung, keterbatasan tersebut tidak sampai melumpuhkan jalannya program. Tingginya komitmen swadaya pengurus, adanya sokongan dana eksternal non-pemerintah (CSR), serta kesadaran kolektif warga yang konsisten memilah sampah dari rumah tangga menjadi modal sosial pengganti

(*substitute resource*) yang kuat, sehingga Bank Sampah Sumber 10 tetap mampu mempertahankan ritme penimbangan rutin bulanan dan beroperasi secara mandiri di tingkat lokal.

### **Disposisi**

Berdasarkan hasil pembahasan dari ketiga narasumber, indikator disposisi dalam implementasi Program Bank Sampah Sumber 10 di Kelurahan Tegalsari menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan dukungan para pelaksana maupun masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Disposisi dalam teori ini menekankan pada adanya kemauan, komitmen, serta sikap positif dari pelaksana kebijakan dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Disposisi tersebut tercermin dari tiga pihak yang terlibat langsung dalam program, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pengelola Bank Sampah Sumber 10, dan masyarakat selaku nasabah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mencerminkan disposisi melalui komitmen dalam melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap program bank sampah. Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penggunaan aplikasi digital SIBASAM sebagai sarana *monitoring* kegiatan bank sampah, mulai dari data tonase sampah, jumlah nasabah, hingga nilai ekonomi yang dihasilkan. Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatif sampah anorganik terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kesungguhan dalam memastikan program berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Komitmen yang ditunjukkan oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut juga sejalan dengan disposisi yang diperlihatkan oleh pengelola Bank Sampah Sumber 10. Pengelola

memperlihatkan disposisi yang kuat melalui motivasi internal, tanggung jawab moral, serta kepedulian sosial yang dimiliki oleh ketua pelaksana program. Bu Mahmuda selaku pengelola menunjukkan sikap keteladanan dengan menjadi contoh langsung bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan bank sampah. Program ini tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pengelolaan sampah semata, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran lingkungan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sikap positif, komitmen sosial, dan semangat pengabdian yang dimiliki pengelola menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program di lingkungan masyarakat.

Disposisi positif yang ditunjukkan oleh pemerintah dan pengelola pada akhirnya turut mendorong tumbuhnya sikap serupa di kalangan masyarakat selaku nasabah Bank Sampah Sumber 10. Masyarakat menilai bahwa petugas bank sampah memiliki sikap ramah, membantu, dan terbuka dalam memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah, sehingga tercipta komunikasi yang baik dan hubungan sosial yang harmonis antara pelaksana program dan masyarakat. Lebih dari itu, masyarakat mulai terbiasa memilah sampah rumah tangga secara mandiri dan rutin menyetorkan sampah ke bank sampah setiap bulan. Bahkan, beberapa warga turut membantu proses pemilahan dan penimbangan sampah secara gotong royong. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran dan dukungan nyata dari masyarakat terhadap keberlangsungan program.

Keseluruhan hasil pembahasan dari ketiga narasumber tersebut menegaskan bahwa indikator disposisi dalam implementasi Program Bank Sampah Sumber 10 telah berjalan dengan baik dan relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hal tersebut dibuktikan melalui komitmen pemerintah dalam pengawasan dan

edukasi, keteladanan serta kepedulian sosial dari pengelola program, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan pengelolaan sampah. Sikap positif dan dukungan dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan implementasi Program Bank Sampah Sember 10 di Kelurahan Tegalsari.

### **Birokrasi**

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber, faktor birokrasi dalam implementasi Program Bank Sampah Sember 10 di Kelurahan Tegalsari telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Struktur birokrasi dalam program ini tercermin dari adanya regulasi, pembagian tugas, koordinasi, serta mekanisme pelaksanaan yang mendukung keberlangsungan program bank sampah di masyarakat. Gambaran tersebut dapat dilihat dari perspektif tiga pihak yang terlibat langsung, yakni Dinas Lingkungan Hidup, pengelola bank sampah, dan masyarakat selaku nasabah.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah mendasarkan implementasi program pada regulasi yang berjenjang, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa Program Bank Sampah Sember memiliki dasar hukum yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan. Meskipun belum terdapat SOP tertulis yang baku, Dinas Lingkungan Hidup tetap menjalankan perannya sebagai fasilitator dan pendamping bagi masyarakat maupun pengelola bank sampah melalui diskusi dan koordinasi bersama dalam menyelesaikan berbagai kendala di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya tercermin dari aturan formal, tetapi juga dari adanya koordinasi yang fleksibel dan adaptif dalam mendukung pelaksanaan program.

Sejalan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut, pengelola

Bank Sampah Sember 10 Kelurahan Tegalsari juga menjalankan struktur birokrasi melalui organisasi yang telah ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 188.4/1024/436.7.12/2020. Kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus membantu kegiatan operasional program berjalan lebih terarah dan terorganisir. Pelaksanaan program juga telah memiliki SOP sebagai pedoman kerja, walaupun masih disampaikan secara lisan dan belum terdokumentasi secara tertulis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara administratif masih terdapat kekurangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman antar pengurus maupun masyarakat. Meski demikian, koordinasi dan komunikasi yang baik antar pengurus mampu menjaga kelancaran pelaksanaan program sehingga kegiatan tetap berjalan secara efektif.

Struktur birokrasi yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola pada akhirnya turut dirasakan langsung oleh masyarakat selaku nasabah Bank Sampah Sember 10. Hal tersebut tercermin melalui sosialisasi dan pengarahan yang dilakukan secara langsung oleh pihak pengelola, yang secara aktif turun ke lingkungan masyarakat untuk memberikan penjelasan terkait tata cara pengelolaan dan penyetoran sampah. Sosialisasi tersebut dinilai mudah dipahami sehingga masyarakat mampu memahami prosedur pelaksanaan program dengan baik. Bahkan, masyarakat dapat menjalankan kegiatan bank sampah secara mandiri setelah mendapatkan pengarahan dari pengelola. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pelaksanaan dan koordinasi yang jelas antara pengelola dan masyarakat sebagai pengguna program.

Secara keseluruhan, faktor birokrasi dalam implementasi Program Bank Sampah Sember 10 telah memenuhi indikator teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Hal

tersebut dibuktikan melalui adanya landasan regulasi yang jelas dari Dinas Lingkungan Hidup, pembagian tugas dalam struktur organisasi pengelola, serta mekanisme sosialisasi yang mampu dipahami dan dijalankan oleh masyarakat secara mandiri. Meskipun masih terdapat kekurangan, seperti belum adanya SOP tertulis yang baku, program tetap dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh komunikasi, pendampingan, dan koordinasi yang aktif antara Dinas Lingkungan Hidup, pengelola bank sampah, dan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Program Bank Sampah Sumber 10 di Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya, secara umum telah berjalan efektif dan mandiri berdasarkan kerangka kerja model George C. Edwards III. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh proses transmisi informasi dan komunikasi yang jelas, didukung penuh oleh struktur birokrasi lokal yang adaptif, serta respon disposisi yang sangat positif berupa komitmen tinggi pengurus dan kesadaran kolektif warga dalam memilah sampah rumah tangga. Fleksibilitas pelaksana Program Bank Sampah Sumber 10 secara konsisten berhasil mengoptimalkan penyerapan serta pengelolaan volume limbah anorganik di wilayah tersebut.

Meskipun program berjalan secara konsisten, efektivitas pada aspek sumber daya masih menghadapi hambatan berupa adanya kesenjangan koordinasi dan ketidaksesuaian antara pihak regulator dan pelaksana. Evaluasi mendalam menunjukkan adanya ketidakselarasan data, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengklaim telah mendistribusikan stimulus sarana fisik operasional seperti timbangan dan buku tabungan, tetapi fakta empiris lapangan membuktikan bahwa fasilitas yang digunakan selama ini murni bersumber dari swadaya mandiri pengurus dan skema

kemitraan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun demikian, keterbatasan dukungan fasilitas dari sektor publik ini tidak sampai melumpuhkan program karena berhasil digantikan oleh modal sosial (*substitute resources*) yang kuat dari sinergi masyarakat dan sektor swasta.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada dinas terkait untuk segera melakukan pembenahan, transparansi, dan pengawasan langsung terhadap rantai pasok distribusi bantuan fasilitas agar tepat sasaran dengan pengelola unit di lapangan. Bagi pihak pengelola Bank Sampah Sumber 10, penting untuk terus memperluas jaringan kemitraan dengan sektor swasta guna menjaga kemandirian finansial jangka panjang dan menunjang biaya perawatan armada pengangkut sampah. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas lokus kajian pada unit-unit bank sampah yang tidak aktif di Kota Surabaya guna memperoleh analisis komparatif yang lebih komprehensif mengenai variabel penghambat kebijakan dari sudut pandang institusional maupun kultural.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Pengelola Bank Sampah Sumber 10 Kelurahan Tegalsari, serta masyarakat Kelurahan Tegalsari yang telah bersedia menjadi narasumber dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pengalaman, serta pandangan yang sangat berharga selama proses pengumpulan data penelitian. Kontribusi dan kerja sama yang diberikan oleh seluruh narasumber sangat membantu dalam memperoleh data yang akurat dan mendalam sehingga penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Program Bank Sampah di Kelurahan Tegalsari Kota Surabaya" dapat disusun dengan baik. Penulis mengapresiasi segala bentuk dukungan, keterbukaan, dan partisipasi yang telah diberikan demi kelancaran pelaksanaan penelitian ini..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, H. Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Dwicahyani, A. R., Radityaningrum, A. D., Novianarenti, E., & Erlinda, N. (2022). Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat di. *01(01)*, 22–29.
- Kusuma, A. N., Meidiana, C., & Sari, K. E. (2025). Evaluasi Kinerja Bank Sampah Dalam Reduksi Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Kebonsari, Kota Surabaya. *Jurnal Planning for Urban Region and Environment*, *12(0341)*.
- Laary, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Administrasi Publik*, *VIII(120)*, 60–67.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya No.5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya (2014).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (2021).
- Saleh, G. S., Umuri, H., & Uno, D. (2025). Implementasi Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus: Bank Sampah Kecamatan Buntulia). *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *17(3)*.
- Sinaga, D. (2023). Buku Ajar Metodologi Penelitian.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2025). Data Pengelolaan Sampah & RTH.
- Sulistina, E. (2023). Lingkungan Hijau : Strategi Penyelesaian Masalah Sampah. *3(3)*, 131–140.
- Surabaya, W. K. (2025). Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/210/436.1.2/2025 Tentang Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Kota Surabaya Tahun 2025-2026.
- Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, *IX(3)*, 339–350.
- Trifena, A. (2025). Bank Sampah Sumber Terima 6 Ton Sampah per Bulan di Surabaya. *Detikjatim*.